

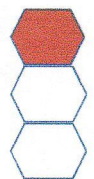
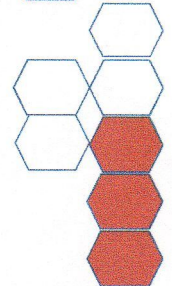
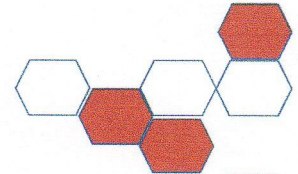
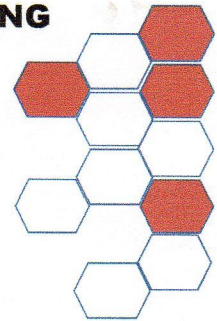
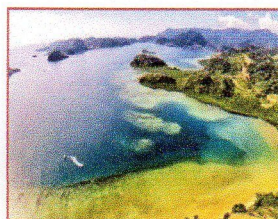
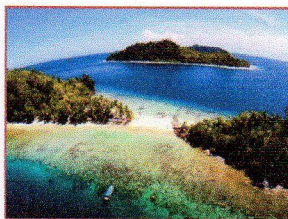
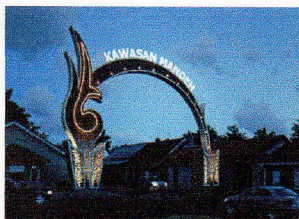
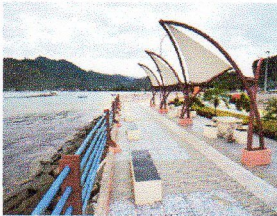
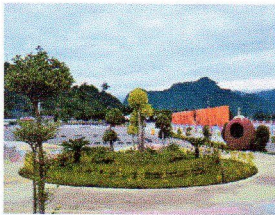
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2020



LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Kepegawaian
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Lampiran :**
- I. Perjanjian Kinerja Eselon II
 - II. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
 - III. Prestasi-Prestasi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataantahun 2019 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana lainnya (APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN) Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 53 Tahun 2014.

Painan, Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

ERA SUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas ini terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 32 Tahun 2010 tentang rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu Dinas menyusun rencana program dan kegiatan, baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan dana yang tersedia.

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu dinas penyelenggara urusan wajib yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 233.228.529.711,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.978.048.789,- dan belanja langsung sebesar Rp. 228.250.480.922,- untuk mengelola sebanyak 21 Program dan 101 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKjIP Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah. Bahan LKjIP ini selanjutnya menjadi masukan bagi Pemda dalam menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1.2.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat terhadap keseluruhan program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil kerja (kinerja) dinas pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sasaran untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai

1.3.DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021.

1.4.STRUKTUR ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sekretariat, terdiri dari
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi
- b. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
 1. Seksi Penataan Ruangan
 2. Seksi Pertamanan
 3. Seksi Kebersihan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem

penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksiserta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;

- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan pentataan ruang;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan pentataan ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan pentataan ruang; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan pelayanan umum dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan dinas;
- d. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- e. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas sesuai dengan ketentuan;
- f. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategi dinas;
- g. mengkoorganisasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta Kegiatan Operasional Dinas;

- h. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi;
- i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawab dinas;
- n. merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional pada urusan masing-masing seksi di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, serta UPTD Laboratorium;
- p. mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan serta UPTD Laboratorium, untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- q. mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- r. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- s. mengatur, memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan menetapkan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;

- t. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
2. pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dinas;
3. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan;
4. penyelenggaraan urusan jasa konstruksi.
5. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
6. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
7. penataan organisasi dan tata laksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat kepada kepala dinas;
- d. melaksanakan koordinasi sasaran penyusunan rencana strategi dinas, serta koordinasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan operasional dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;

- f. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak (LP2P) Pribadi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, mengarahkan dan mengatur penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- h. melaksanakan pengkoordinasian laporan daftar hadir pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- i. mengkoordinasi, menyelia, dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat kepada bawahan yang mengurus umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta urusan pembinaan jasa konstruksi.;
- j. melaksanakan penataan naskah dinas, persuratan dan dokumen lainnya serta pengarsipan dan pemustakaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
- l. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi serta mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan identifikasi permasalahan
- p. serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala dinas;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- s. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;

- t. menyelenggarakan tertib administrasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga mempunyai uraian tugas :

- a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- c. menyusun konsep sasaran kegiatan bidang bina marga;
- d. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang bina marga;
- e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi bidang bina marga;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan kinerja bidang bina marga kepada kepala dinas melalui sekretaris;

- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional pada bidang bina marga, yang meliputi urusan perencanaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan perencanaan jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pembangunan jalan dan jembatan;
- k. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan bidang bina marga;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- o. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
- p. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- q. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina marga;
- s. membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan bina marga; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh dinas.

BIDANG TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;

urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang dan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- f. mengelola evaluasi bidang tata ruang dan kebersihan;
- g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang tata ruang dan kebersihan;

- j. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang tata ruang dan kebersihan dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- k. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata ruang dan kebersihan;
- l. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang cipta karya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;

- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan tata ruang, tata bangunan, dan jasa konstruksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;
- i. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM PENGUJIAN KONTRUKSI

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas memimpin Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Jasa Pengujian Mutu Bahan meliputi Pengujian Tanah, Beton, Aspal dan Bahan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan , Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan laboratorium Pengujian konstruksi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Penyiapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Laboratorium
- d. Pelayanan jasa pengujian
- e. Pemungutan retribusi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1.5 Kepegawaian

Dalam melaksanakan pekerjaan , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember Tahun 2019 di laksanakan oleh 64 (Enam Puluh Empat) orang pegawai negeri sipil terdiri dari 46 orang laki – laki atau 71.88 % laki – laki dan 18 orang perempuan atau 28.12 % perempuan

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki – laki	46 Orang	71.88 %
Perempuan	18 Orang	28.12 %
Jumlah	64 Orang	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan , SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan S1

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	4	6.25 %
2	D4/S1	34	53.13 %
3	D3	7	10.93%
4	SLTA	19	29.69%
	Jumlah	64 Orang	100%

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan penetapan kinerja untuk tahun 2019
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN 2016-2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah dengan tujuan yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah. Dari tujuan dan Misi kedua Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Misi, Tujuan dan Sasaran

<i>Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</i>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi , pelayanan dasar dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase jalankabupaten kondisi baik dan persentasejembatan kondisi baik

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar 3. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk berakses air minum/bersih 2. Persentase Akses Sanitasi Layak 1. Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan akuntabel dan berkinerja yang didukung dengan bangunan pelayanan public yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Begitupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membuat rencana kinerja seperti terlampir.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik	28.90%
		Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	44.98%
2	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum / bersih dan persentase akses sanitasi layak	92.47% dan 74.68%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1. Persentase Dokumen dan Regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	12.5%
		2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	66.14%
4	Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	21 Unit
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	A

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data Penanggung Jawab
(1)	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik Persentase Jembatan Kabupaten kondisi baik	$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga
2.	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum/bersih Persentase akses Sanitasi Layak	$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	1.Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Tata Ruang yang diperda / diperbupkan}}{\text{Jumlah dokumen tata ruang}} \times 100\%$ $\frac{\text{Luas RTH yang tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasana pelayanan public	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik.	Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / dipelihara pertahun selama 5 tahun	Bidang Cipta Karya
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian AKIP Dinas Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUTR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.5
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.1.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 3.6

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH							
Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi , pelayanan dasar dan pengembangan wilayah. 2. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan. 							
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1.	Persentase jalankabupaten kondisi baik	%	28.90	28.23	97.68
		2.	PersentaseJembatan Kabupaten Kondisi baik	%	44.98	41.11	91.40
2.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan dasar	1.	Persentase Penduduk berakses air minum / bersih	%	92.47	94.88	102.61
		2.	Persentase akses sanitasi layak	%	74.68	75.13	100.60
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1.	Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang telah di tetapkan	%	12.5	12.5	100
		2.	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100
4.	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik		Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	Unit	21	21	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	Nilai	A (90)	*	*

* Hasil penilaian AKIP tahun 2019 belum ada dari Inspektorat

3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan Jembatan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni:

- a. Persentase jalan kabupaten kondisi baik
- b. Persentase jembatan kabupaten kondisi baik

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jalan kabupaten kondisi baik	%	28.90	28.23	97.68
2	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	44.98	41.11	91.40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase jalan Kabupaten kondisi baik merupakan indicator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan .Dengan panjang jalan Kabupaten sepanjang 2333.18 Km, di targetkan pada akhir tahun 2019 persentase jalan kondisi baik dapat menjadi 28.90 %. Dengan realisasi 28.23 % dan pencapaian atas target sebesar 97.68% tersebut maka klarifikasi penilaian untuk jalan kondisi baik adalah sangat baik.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah panjang jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati Tahun 2015 adalah 2.333, 18 Km

Tabel 3.8
Rekapitulasi Daftar Jalan Jaringan Induk Kabupaten
Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Tahun 2019

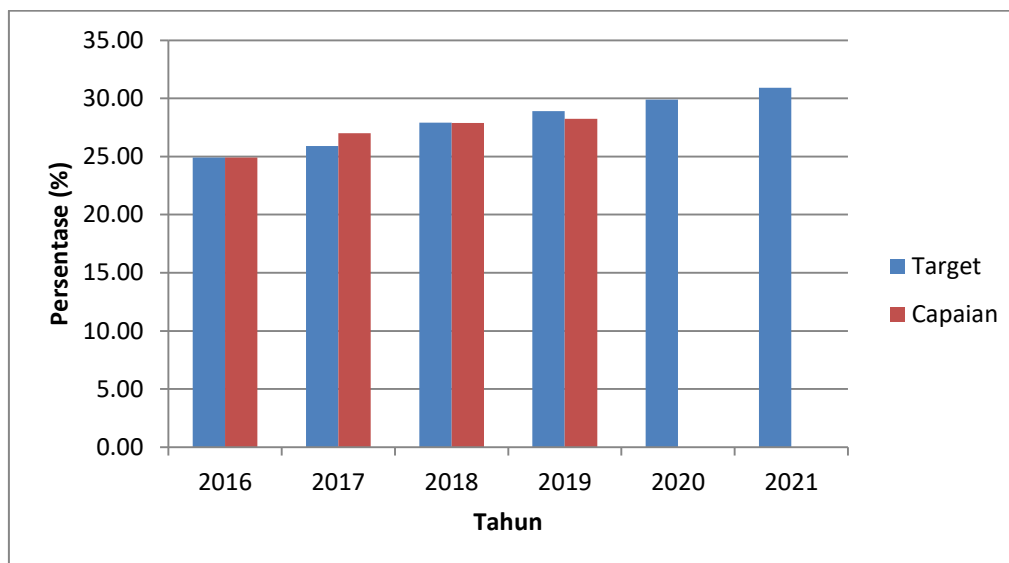
No	Kecamatan	Panjang Jalan Menurut Permukaan								Panjang Jalan (Km)	Panjang Jalan Menurut Kondisi								Panjang Jalan (Km)
		Aspal		Kerikil		Tanah		Beton			Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat		
		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%		(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	(Km)	%	
1	KOTO XI TARUSAN	50.00	38.49%	9.20	7.08%	31.30	24.10%	39.40	30.33%	129.90	35.15	27.06%	31.10	23.94%	25.25	19.44%	38.40	29.56%	129.90
2	BAYANG	72.78	57.40%	8.42	6.64%	17.90	14.12%	27.70	21.85%	126.80	69.82	55.06%	20.00	15.77%	20.10	15.85%	16.88	13.31%	126.80
3	BAYANG UTARA	6.20	15.50%	3.50	8.75%	14.60	36.50%	15.70	39.25%	40.00	5.70	14.25%	8.90	22.25%	4.90	12.25%	20.50	51.25%	40.00
4	IV JURAI	88.80	58.91%	6.50	4.31%	39.75	26.37%	15.70	10.41%	150.75	80.55	53.43%	10.70	7.10%	19.70	13.07%	39.80	26.40%	150.75
5	BATANG KAPAS	46.45	42.27%	27.80	25.30%	10.90	9.92%	24.75	22.52%	109.90	40.10	36.49%	25.40	23.11%	25.75	23.43%	18.65	16.97%	109.90
6	SUTERA	80.20	39.66%	60.84	30.09%	52.10	25.77%	9.06	4.48%	202.20	60.38	29.86%	20.60	10.19%	33.44	16.54%	87.78	43.41%	202.20
7	LENGAYANG	101.28	38.34%	61.16	23.15%	63.85	24.17%	37.87	14.34%	264.15	104.45	39.54%	30.21	11.43%	43.80	16.58%	85.70	32.44%	264.15
8	RANAH PESISIR	70.64	46.90%	46.27	30.72%	17.75	11.79%	15.95	10.59%	150.60	54.69	36.31%	20.75	13.78%	48.32	32.08%	26.85	17.83%	150.60
9	LINGGO SARI BAGANTI	101.18	46.52%	55.15	25.36%	55.02	25.30%	6.15	2.83%	217.50	82.03	37.71%	18.20	8.37%	53.47	24.58%	63.80	29.33%	217.50
10	AIRPURA	29.25	18.85%	69.45	44.75%	45.40	29.25%	11.10	7.15%	155.20	30.15	19.43%	11.30	7.28%	56.05	36.11%	57.70	37.18%	155.20
11	PANCUNG SOAL	17.28	15.94%	42.50	39.21%	39.45	36.40%	9.15	8.44%	108.38	13.30	12.27%	11.58	10.68%	35.35	32.62%	48.15	44.43%	108.38
12	BASA AMPEK BALAI	15.90	23.38%	29.70	43.68%	16.50	24.26%	5.90	8.68%	68.00	12.90	18.97%	5.90	8.68%	10.20	15.00%	39.00	57.35%	68.00
13	RANAH IV HULU TAPAN	6.10	10.55%	10.80	18.69%	35.80	61.94%	5.10	8.82%	57.80	8.20	14.19%	1.80	3.11%	9.20	15.92%	38.60	66.78%	57.80
14	LUNANG	33.80	10.80%	90.60	28.95%	185.60	59.30%	3.00	0.96%	313.00	20.40	6.52%	12.70	4.06%	89.50	28.59%	190.40	61.83%	313.00
15	SILAUT	41.50	17.36%	100.95	42.24%	91.70	38.37%	4.85	2.03%	239.00	40.83	17.08%	29.20	12.22%	83.97	35.13%	85.00	35.56%	239.00
TOTAL		761.35	32.63%	622.83	26.69%	717.62	30.76%	231.38	9.92%	2333.18	658.64	28.23%	258.34	11.07%	559.00	23.96%	857.21	36.74%	2333.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Jalan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Jalan Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian SetiapTahun (%)	24.90	25.90	27.90	28.90	29.90	30.90
2	Realisasi (%)	24.90	27.00	27.87	28.23		



Gambar 3.1

Target dan realisasi per tahun Jalan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Capaian indicator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang Jalan Kabupten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$$

Capaian Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data inspeksi kondisi jalan tahun 2019 dan pemutakhiran data base jalan. Pemutakhiran data base jalan dilakukan pada bulan desember . Pemutakhiran data base jalan merupakan akumulasi dari hasil kegiatan fisik jalan baik itu pekerjaan pembangunan, peningkatan kuantitas dan pemeliharaan jalan. Data Kondisi jalan menyajikan total panjang jalan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi baik, Sedang , Rusak dan Rusak Berat. Berdasarkan data kondisi jalan tersebut dapat di hitung persentase panjang jalan status kabupaten dalam kondisi baik dan kondisi

mantap. Hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung indicator persentase jalan dalam kondisi baik seperti pada gambar berikut :



Peningkatan Jalan Rawang – Timbulun Kec. Sutura Tahun 2019.

Definisi operasional ke- PU-an tentang jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di bagi panjang seluruh jalan kabupaten di Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

$$= \frac{658.64}{2333.18} \times 100\% = 28.23 \%$$

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	24.90	27.08	27.87	28.23	100.00	104.25	99.89	97.68

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang jalan Status Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.11 Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Jenis Kondisi dan	Status Jalan							
		Jalan Kabupaten							
		2012 Km	2013 Km	2014 Km	2015 Km	2016 Km	2017 Km	2018 Km	2019 Km
A	Jenis Permukaan								
	1 Aspal	728.35	748.65	755.37	691.19	726.88	739.81	749.79	761.35
	2 Kerikil	502.29	483.79	492.66	625.52	670.03	637.60	631.34	622.83
	3 Beton	397.07	397.17	395.23	193.25	202.37	231.90	234.13	717.62
	4 Tanah	695.78	693.88	680.30	823.22	733.90	723.87	717.92	231.38
Jumlah		2323.49	2323.49	2323.56	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18
B	Kondisi Jalan								
	1 Baik	857.73	866.41	931.14	798.49	580.87	630.01	650.18	658.64
	2 Sedang	704.03	704.1	653.34	202.02	262.61	246.48	250.61	258.34
	3 Rusak	368.35	363.85	357.88	653.57	641.46	558.11	548.23	559
	4 Rusak Berat	393.38	389.13	381.13	679.10	848.25	898.58	884.16	857.21
Jumlah		2323.49	2323.49	2,323.49	2,333.18	2,333.18	2,333.18	2,333.18	2333.18
C	Panjang Jalan								
	1 Kelas I								
	2 Kelas Jalan II								
	3 Kelas Jalan III	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90	232.90
	4 Kelas Jalan III A	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50	376.50
	5 Kelas Jalan III B	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26	413.26
	6 Kelas Jalan III C	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Kelas Tidak Rinci	1300.83	1300.83	1300.83	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52	1310.52
Jumlah		2323.49	2323.49	2323.49	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18	2333.18

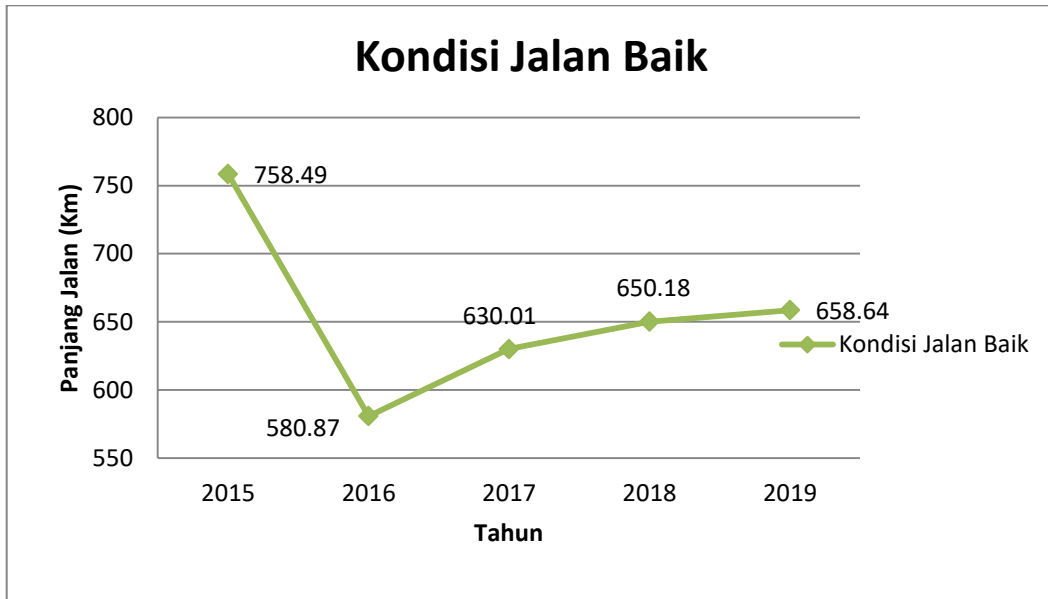
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sepanjang 8.46km padatahun 2019.

Begitu juga dengan jenis permukaan jalan aspal mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu sepanjang 11.56 km.

**Tabel 3.12
Kenaikan Panjang jalan kabupaten kondisi baik tahun 2015s/d2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan kabupaten kondisi baik (Km)	758,49	580,87	630,01	650.18	658.64



Gambar 3. 2 Grafik Kenaikan Panjang jalan kondisi baik tahun 2015s/d2019

Adapun kondisi kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13 KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2019

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (SK)	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI								KEMANTAPAN JALAN			
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		MANTAP		TIDAK MANTAP	
				(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	013.018	INDRAPURA - MUARA SAKAI	7.300	3.600	49.315	3.300	45,205	0.200	2.740	0.200	2.740	6.900	94.521	0.400	5.749
2	06.073	PASAR BARU – ALAHAN PANJANG	49.400	4.200	8.502	24.855	50.314	8.373	16.949	11.972	24.235	29.055	58.816	20.345	41.184
3	06.083	TELUK KABUNG - MANDEH – TARUSAN	44.100	17.800	40.363	25.900	58.730	0.400	0.907	0.000	0.000	43.700	99.093	0.400	0.907
4	06.086	SURANTIAH - KAYU ARO – LANGGAI	27.700	0.600	2.166	16.100	58.123	0.600	2.166	10.400	37.545	16.700	60.289	11.000	39.711
5	06.100	BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN	1.200	0.300	25.000	0.750	62.500	0.150	12.500	0.000	0.000	1.050	87.500	0.150	12.500

2. Persentase Jembatan Kabupaten kondisi baik

Capaian indikator persentase panjang jembatan Kabupaten dalam kondisi baik di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh Jembatan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik di peroleh dari data kondisi jembatan tahun 2019. Data Kondisi jembatan menyajikan panjang jembatan kabupaten dalam kondisi Baik, Sedang , Rusak Ringan dan Rusak Berat. Data ini merupakan hasil pemutakhiran kondisi jembatan yang ada dengan pembaharuan kondisi terakhir berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jembatan pada tahun 2019 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan Jembatan Kp. Danau Rantau Simalenang Kec. Linggo Sari Baganti Tahun 2019

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah jembatan tahun 2019 adalah unit 450 jembatan, seperti terlihat tabel berikut :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2019

No	Kecamatan	Tipe/Kondisi				Jumlah Jembatan
		Kondisi				
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	10	14	2	2	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	8	0	10
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	6	9	2	0	17
7	LENGAYANG	30	29	10	2	71
8	RANAH PESISIR	20	13	9	0	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	22	11	2	0	35
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	8	13	5	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	7	6	0	1	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	28	10	19	3	60
TOTAL		185	160	94	11	450

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2018

No	Kecamatan	<i>Tipe/Kondisi</i>				Jumlah Jembatan
		Kondisi				
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	14	2	3	28
2	BAYANG	9	10	2	0	21
3	BAYANG UTARA	1	1	7	0	9
4	IV JURAI	10	11	1	1	23
5	BATANG KAPAS	11	11	11	0	33
6	SUTERA	5	9	2	1	17
7	LENGAYANG	30	29	10	2	71
8	RANAH PESISIR	17	13	11	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	21	12	3	0	36
10	AIRPURA	3	7	4	0	14
11	PANCUNG SOAL	8	14	4	0	26
12	BASA AMPEK BALAI	7	6	1	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	2	0	0	4
14	LUNANG	18	13	19	2	52
15	SILAUT	28	9	20	3	60
<i>TOTAL</i>		<i>179</i>	<i>161</i>	<i>97</i>	<i>13</i>	<i>450</i>

Tabel 3.14 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2017

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	9	10	7	2	28
2	BAYANG	8	6	6	1	21
3	BAYANG UTARA	1	0	8	0	9
4	IV JURAI	9	7	6	1	23
5	BATANG KAPAS	10	6	16	1	33
6	SUTERA	5	10	1	1	17
7	LENGAYANG	30	23	12	6	71
8	RANAH PESISIR	17	10	13	2	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	18	12	3	2	35
10	AIRPURA	3	6	5	0	14
11	PANCUNG SOAL	7	14	3	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7	6	0	1	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	2	0	2	0	4
14	LUNANG	18	7	22	5	52
15	SILAUT	28	7	16	9	60
TOTAL		172	124	120	33	449

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.15 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	8	8	5	6	27
2	BAYANG	6	6	6	3	21
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	3	2	16	2	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	1	5	8	3	17
7	LENGAYANG	16	25	24	6	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	20	0	30	2	52
15	SILAUT	24	0	29	7	60
TOTAL		110	46	258	34	448

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pessel

Tabel 3.16 Rekapitulasi Data Dasar Jembatan Menurut Kondisi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kondisi				Jumlah Jembatan
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	KOTO XI TARUSAN	7	0	20	1	28
2	BAYANG	5	0	21	1	27
3	BAYANG UTARA	0	0	9	0	9
4	IV JURAI	4	0	18	1	23
5	BATANG KAPAS	5	0	28	0	33
6	SUTERA	4	0	21	0	25
7	LENGAYANG	14	0	54	3	71
8	RANAH PESISIR	8	0	33	1	42
9	LINGGO SARI BAGANTI	6	0	27	2	35
10	AIRPURA	3	0	11	0	14
11	PANCUNG SOAL	4	0	20	2	26
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	0	8	0	14
13	RANAH IV HULU TAPAN	0	0	4	0	4
14	LUNANG	21	0	30	1	52
15	SILAUT	25	0	28	7	60
TOTAL		112	0	332	19	463

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

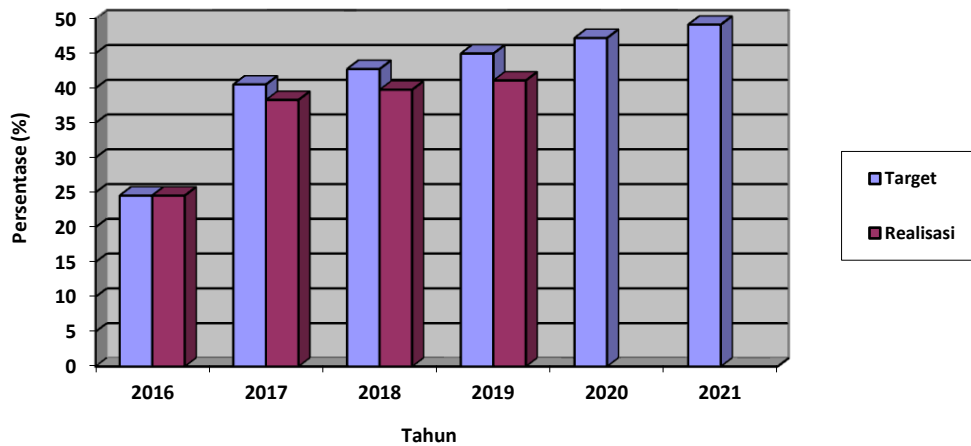
Persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 adalah :

$$= \frac{185}{450} \times 100\% = 41.11\%$$

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	24.55	40.53	42.76	44.98	47.22	49.14
2	Realisasi	24.55	38.31	39.78	41.11		



Gambar 3.3

Target dan realisasi per tahun Jembatan Kondisi baik menurut Renstra 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator jembatan kabupaten kondisi baik, sebagai berikut :

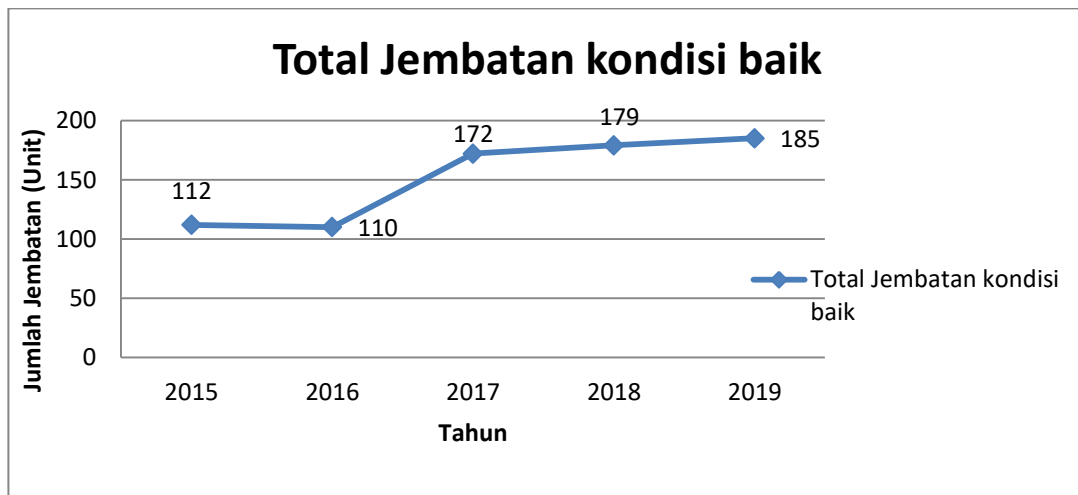
Tabel 3.18
Capaian Kinerja Indikator Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 s/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2018
1.	Jembatan kabupaen kondisi baik	%	24.55	38.31	39.78	41.11	100	94.52	93.03	91.40

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik dan dapat di lihat bahwa jumlah jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak6 Unit pada tahun 2019.

Tabel 3.19
Kenaikan Jumlah jembatankondisi baik tahun 2015s/d2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jembatan Kabupaten Kondisi Baik (unit)	112	110	172	179	185



Gambar 3.4 Kenaikan jumlah jembatan kondisi baik tahun 2015/d2019

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Maupun Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam mendukung aksesibilitas jalan dan jembatan untuk menjamin masyarakat sampai pada tempat asal – tujuan tepat waktu, aman dan nyaman sangat tinggi baik dari sisi penyediaan dana maupun pembinaan dan pengawasan mutu jalan daerah.
2. Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah menjadi kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan baik secara berkala, rutin maupun periodic setiap tahunnya.

Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan adalah :

1. Data base jalan dan Jembatan belum terupdate secara maksimal.
2. Kegiatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan belum optimal dilaksanakan untuk semua unit jembatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan

Strategi / Upaya Pemecahan Masalah adalah :

1. Penyiapan Dokumen pemetaan jaringan jalan dan jembatan yang terupdate sesuai kebutuhan setiap tahunnya.
2. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan harus dilaksanakan secara rutin
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan penyedia jasa sebagai unsur pelaksana pembangunan melalui diklat teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.20
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.180.397.131	4.998.158.487	96,48
2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	88.245.371.876	85.343.473.627	96,7 1
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	185.579.213	182.397.165	98.29
4	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong	611.785.029	553.294.800	90.44
5	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	56.442.316	55.778.494	98.82
	Jumlah	94.279.575.565	91.133.102.573	96,66

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 94.279.575.565 terealisasi sebesar Rp. 91.133.102.573 atau 96.66%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.34% atau Rp. 3.146.472.992

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

- a. Persentase penduduk berakses air minum /bersih
- b. Persentase akses sanitasi layak

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penduduk berakses air minum /bersih	%	92.47	94.88	102.61
2	Persentase akses sanitasi layak	%	74.68	75.13	100.60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Persentase penduduk berakses air minum /bersih

Capaian indicator Persentase Penduduk Berakses air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indicator Persentase cakupan air minum /bersih tahun 2019 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2019

Yaitu sambungan rumah PDAM tahun 2019, sambungan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dan Sambungan Rumah Pamsimas Tahun 2019.

Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2019 dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 3.22
ANALISA DATA CAKUPAN AKSES PENYEDIAAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
SAMPAI TAHUN 2019

No	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH RUMAH TANGGA	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR (NAGARI/ KEL)
				JARINGAN PERPIPAAN				NON PERPIPAAN						
				PDAM		NON PDAM		(SGL + PMA + PAH)						
				(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)	(Ruta)	(%)					
	JUMLAH		106,185	22,778	21.45	19,189	18.07	58,781	55.36	100,748	94.88	5,437	5.12	
I	SILAUT		3,505	-	-	1,744	49.76	1,632	46.56	3,376	96.32	129	3.68	
	1	Silaut	672	-	-	239	35.57	415	61.76	654	97.32	18	2.68	
	2	Sambungo	249	-	-	90.00	36.14	156	62.65	246	98.80	3	1.20	
	3	Air Hitam	328	-	-	85	25.91	194	59.15	279	85.06	49	14.94	
	4	Lubuk Bunta	375	-	-	202	53.87	170	45.33	372	99.20	3	0.80	
	5	Durian Seribu	311	-	-	167	53.70	134	43.09	301	96.78	10	3.22	
	6	Pasir Binjai	445	-	-	307	68.99	134	30.11	441	99.10	4	0.90	
	7	Talang Binjai	169	-	-	-	-	138	81.66	138	81.66	31	18.34	
	8	Sungai Serik Silaut	264	-	-	170.00	64.39	90	34.09	260	98.48	4	1.52	
	9	Sungai Pulai Silaut	375	-	-	214	57.07	157	41.87	371	98.93	4	1.07	
	10	Sungai Sirah Silaut	317	-	-	270	85.17	44	13.88	314	99.05	3	0.95	

II	LUNANG		4,999	-	-	2,257	45.15	2,597	51.95	4,854	97.10	145	2.90	
	1	Lunang	857	-	-	-	-	784	91.48	784	91.48	73	8.52	
	2	Lunang Selatan	440	-	-	121.00	27.50	314	71.36	435	98.86	5	1.14	
	3	Lunang Utara	418	-	-	289.00	69.14	124	29.67	413	98.80	5	1.20	
	4	Lunang Barat	373	-	-	346	92.76	21	5.63	367	98.39	6	1.61	
	5	Sindang Lunang	389	-	-	100	25.71	250	64.27	350	89.97	39	10.03	
	6	Lunang Satu	728	-	-	110	15.11	616	84.62	726	99.73	2	0.27	
	7	Lunang Tengah	310	-	-	309.00	99.68	0	0.00	309	99.68	1	0.32	
	8	Pondok Pariang Lunang	274	-	-	132	48.18	141	51.46	273	99.64	1	0.36	
	9	Lunang Dua	670	-	-	650	97.01	12	1.79	662	98.81	8	1.19	
	10	Lunang Tiga	540	-	-	200.00	37.04	335	62.04	535	99.07	5	0.93	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN		3,203	362	11.30	273	8.52	2,344	73.18	2,979	93.01	224	6.99	
	1	Tapan	204	36	17.65	-	-	135	66.18	171	83.82	33	16.18	
	2	Batang Arah Tapan	531	167	31.45	-	-	349	65.73	516	97.18	15	2.82	
	3	Pasar Tapan	349	54	15.47	-	-	238	68.19	292	83.67	57	16.33	
	4	Ampang Tulak Tapan	196	-	-	-	-	189	96.43	189	96.43	7	3.57	
	5	Koto Anau Tapan	365	-	-	-	-	324	88.77	324	88.77	41	11.23	
	6	Dusun Baru Tapan	159	-	-	-	-	146	91.82	146	91.82	13	8.18	
	7	Tanjung Pondok Tapan	426	-	-	-	-	385	90.38	385	90.38	41	9.62	
	8	Batang Betung Tapan	507	105	20.71	-	-	398	78.50	503	99.21	4	0.79	

	9	Riak Danau Tapan	274	-	-	82	29.93	179	65.33	261	95.26	13	4.74	
	10	Bukit Buai Tapan	192	-	-	191	99.48	1.00	0.52	192	100.00	-	-	
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN		3,520	72	2.05	40	1.14	3,107	88.27	3,219	91.45	301	8.55	
	1	Kubu Tapan	455	-	-	-	-	443	97.36	443	97.36	12	2.64	
	2	Talang Koto Pulai Tapan	325	56	17.23	-	-	249	76.62	305	93.85	20	6.15	
	3	Binjai Tapan	172	-	-	40	23.26	112	65.12	152	88.37	20	11.6 3	
	4	Sungai Gambir Sako Tapan	154	-	-	-	-	117	75.97	117	75.97	37	24.0 3	
	5	Simpang Gunung Tapan	208	-	-	-	-	146	70.19	146	70.19	62	29.8 1	
	6	Kampung Tengah Tapan	489	16	3.27	-	-	440	89.98	456	93.25	33	6.75	
	7	Sungai Pinang tapan	531	-	-	-	-	499	93.97	499	93.97	32	6.03	
	8	Tebing Tinggi Tapan	614	-	-	-	-	584	95.11	584	95.11	30	4.89	
	9	Talang Balarik Tapan	329	-	-	-	-	303	92.10	303	92.10	26	7.90	
	10	Limau Purut Tapan	243	-	-	-	-	214	88.07	214	88.07	29	11.9 3	
V	PANCUNG SOAL		6,153	1,173	19.06	1,015	16.50	3,657	59.43	5,845	94.99	308	5.01	
	1	Inderapura	388	138	35.57	125	32.22	122	31.44	385	99.23	3	0.77	
	2	Muaro Sakai Inderapura	877	37	4.22	121	13.80	656	74.80	814	92.82	63	7.18	
	3	Tiga Sepakat Inderapura	458	159	34.72	-	-	241	52.62	400	87.34	58	12.6 6	
	4	Inderapura Barat	452	186	41.15	-	-	235	51.99	421	93.14	31	6.86	

	5	Inderapura Selatan	905	-	-	308	34.03	544	60.11	852	94.14	53	5.86	
	6	Kudo kudo Inderapura	747	280	37.48	-	-	442	59.17	722	96.65	25	3.35	
	7	Simpang Lama Inderapura	686	230	33.53	13	1.90	412	60.06	655	95.48	31	4.52	
	8	Tluk Amplu Inderapura	848	-	-	307	36.20	521	61.44	828	97.64	20	2.36	
	9	Inderapura Tengah	473	143	30.23	-	-	310	65.54	453	95.77	20	4.23	
	10	Tigo Sungai Inderapura	319	-	-	141.00	44.20	174	54.55	315	98.75	4	1.25	
VI	AIR PURA		3,720	521	14.01	62.00	1.67	2,814	75.65	3,397	91.32	323	8.68	
	1	Inderapura Timur	660	75	11.36	-	-	530	80.30	605	91.67	55	8.33	
	2	Inderapura Utara	234	75	32.05	-	-	131	55.98	206	88.03	28	11.97	
	3	Pulau Rajo Inderapura	268	-	-	62.00	23.13	202	75.37	264	98.51	4	1.49	
	4	Tluk Kualo Inderapura	305	-	-	-	-	259	84.92	259	84.92	46	15.08	
	5	Palokan Inderapura	316	1	0.32	-	-	251	79.43	252	79.75	64	20.25	
	6	Tanah Bakali Inderapura	772	115	14.90	-	-	601	77.85	716	92.75	56	7.25	
	7	Lubung Betung Inderapura	229	100.00	43.67	-	-	124	54.15	224	97.82	5	2.18	
	8	Damar Lapan Batang Inderapura	264	-	-	-	-	244	92.42	244	92.42	20	7.58	
	9	Muara Inderapura	311	125	40.19	-	-	173	55.63	298	95.82	13	4.18	
	10	Lalang Panjang Inderapura	361	30	8.31	-	-	299	82.83	329	91.14	32	8.86	

VII	LINGGO SARI BAGANTI		10,491	1,686	16.07	850	8.10	7,378	70.33	9,914	94.50	577	5.50	
	1	Air Haji	645	341	52.87	-	-	248	38.45	589	91.32	56	8.68	
	2	Pasar Lama Muara Air Haji	751	214	28.50	-	-	486	64.71	700	93.21	51	6.79	
	3	Muara Gadang Air Haji	490	151	30.82	-	-	305	62.24	456	93.06	34	6.94	
	4	Air Haji Barat	622	77	12.38	-	-	490	78.78	567	91.16	55	8.84	
	5	Pasar Bukit Air haji	555	-	-	-	-	510	91.89	510	91.89	45	8.11	
	6	Sei Sirah Air haji	512	-	-	181	35.35	328	64.06	509	99.41	3	0.59	
	7	Rantau Simalenang Air Haji	707	67	9.48	57	8.06	528	74.68	652	92.22	55	7.78	
	8	Air Haji Tengah	634	66	10.41	-	-	532	83.91	598	94.32	36	5.68	
	9	Air Haji Tenggara	770	42	5.45	-	-	706	91.69	748	97.14	22	2.86	
	10	Punggasan	574	106	18.47	-	-	425	74.04	531	92.51	43	7.49	
	11	Muara Kandis Punggasan	537	43	8.01	-	-	461	85.85	504	93.85	33	6.15	
	12	Punggasan Timur	867	58	6.69	142	16.38	624	71.97	824	95.04	43	4.96	
	13	Padang XI Punggasan	806	2	0.25	196	24.32	583	72.33	781	96.90	25	3.10	
	14	Lagan Mudik Punggasan	504	-	-	-	-	474	94.05	474	94.05	30	5.95	
	15	Lagan Hilir Punggasan	627	232	37.00	153	24.40	216	34.45	601	95.85	26	4.15	
	16	Punggasan Utara	890	287	32.25	121	13.60	462	51.91	870	97.75	20	2.25	
VIII	RANAH PESISIR		7,038	1,113	15.81	1,166	16.57	4,413	62.70	6,692	95.08	346	4.92	
	1	Sungai Tunu	623	-	-	240	38.52	380	61.00	620	99.52	3	0.48	
	2	Palangai	612	113	18.46	89	14.54	328	53.59	530	86.60	82	13.40	

	3	Sungai Tunu Barat	634	-	-	127	20.03	425	67.03	552	87.07	82	12.93	
	4	Sungai Tunu Utara	578	-	-	228	39.45	346	59.86	574	99.31	4	0.69	
	5	Nyir Malambai Palangai	847	172	20.31	134	15.82	510	60.21	816	96.34	31	3.66	
	6	Palangai Kaciak	557	195	35.01	40	7.18	285	51.17	520	93.36	37	6.64	
	7	Palangai Gadang	603	171	28.36	20	3.32	392	65.01	583	96.68	20	3.32	
	8	Koto VIII Palangai	990	281	28.38	83	8.38	600	60.61	964	97.37	26	2.63	
	9	Pasia Palangai	734	181	24.66	-	-	522	71.12	703	95.78	31	4.22	
	10	Sungai Liku Palangai	860	-	-	205	23.84	625	72.67	830	96.51	30	3.49	
IX	LENGAYANG		12,212	3,215	26.33	1,817	14.88	7,056	57.78	12,088	98.98	124	1.02	
	1	Lakitan	1,003	458	45.66	-	-	540	53.84	998	99.50	5	0.50	
	2	Kambang	1,397	494	35.36	271	19.40	628	44.95	1,393	99.71	4	0.29	
	3	Lakitan Selatan	1,238	540	43.62	-	-	663	53.55	1,203	97.17	35	2.83	
	4	Lakitan Tengah	957	427	44.62	248	25.91	280	29.26	955	99.79	2	0.21	
	5	Lakitan Timur	470	277	58.94	-	-	187	39.79	464	98.72	6	1.28	
	6	Lakitan Utara	1,347	225	16.70	145.00	10.76	975	72.38	1,345	99.85	2	0.15	
	7	Kambang Barat	1,940	464	23.92	-	-	1,456	75.05	1,920	98.97	20	1.03	
	8	Kambang Utara	1,907	238	12.48	389	20.40	1,250	65.55	1,877	98.43	30	1.57	
	9	Kambang Timur	1,953	92	4.71	764	39.12	1,077	55.15	1,933	98.98	20	1.02	
X	SUTERA		11,731	3,866	32.96	787	6.71	6,554	55.87	11,207	95.53	524	4.47	
	1	Amping Parak	1,925	978	50.81	-	-	870	45.19	1,848	96.00	77	4.00	
	2	Surantih	1,842	1,078	58.52	-	-	705	38.27	1,783	96.80	59	3.20	
	3	Taratak	555	36	6.49	97	17.48	347	62.52	480	86.49	75	13.5	

													1	
	4	Amping Parak Timur	1,100	521	47.36	163	14.82	383	34.82	1,067	97.00	33	3.00	
	5	Aur Duri Surantih	1,192	643	53.94	-	-	521	43.71	1,164	97.65	28	2.35	
	6	Rawang Gunung Malelo Surantih	1,392	169	12.14	20	1.44	1,155	82.97	1,344	96.55	48	3.45	
	7	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	838	237	28.28	56	6.68	538	64.20	831	99.16	7	0.84	
	8	Koto Nan Tigo Utara Surantih	577	148	25.65	-	-	352	61.01	500	86.66	77	13.34	
	9	Ganting Mudiak Selatan Surantih	669	-	-	143	21.38	487	72.80	630	94.17	39	5.83	
	10	Gantiang Mudiak Utara Surantih	570	-	-	186.00	32.63	359.00	62.98	545	95.61	25	4.39	
	11	Lansano Taratak	610	56	9.18	-	-	533	87.38	589	96.56	21	3.44	
	12	Koto Taratak	461	-	-	122	26.46	304	65.94	426	92.41	35	7.59	
XI	BATANG KAPAS		7,309	1,977	27.05	1,098	15.02	3,912	53.52	6,987	95.59	322	4.41	
	1	IV Koto Hilie	2,145	743	34.64	30	1.40	1,275	59.44	2,048	95.48	97	4.52	
	2	IV Koto Mudiek	588	285	48.47	40	6.80	253	43.03	578	98.30	10	1.70	
	3	Taluak	548	-	-	100	18.25	388	70.80	488	89.05	60	10.95	
	4	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	729	-	-	324	44.44	323	44.31	647	88.75	82	11.25	
	5	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	1,100	-	-	197	17.91	903	82.09	1,100	100.00	-	0.00	
	6	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	593	477	80.44	65	10.96	25	4.22	567	95.62	26	4.38	
	7	Tuik IV Koto Mudiek	660	432	65.45	80	12.12	145	21.97	657	99.55	3	0.45	
	8	Taratak Tompatih IV	544	40	7.35	122	22.43	352	64.71	514	94.49	30	5.51	

		Koto Mudiek												
	9	Taluk Tigo Sakato	402	-	-	140	34.83	248	61.69	388	96.52	14	3.48	
XII	IV JURAI		10,798	5,817	53.87	2,109	19.53	2,317	21.46	10,243	94.86	555	5.14	
	1	Painan	1,363	1,074	78.80	-	-	280	20.54	1,354	99.34	9	0.66	
	2	Painan Selatan	1,073	747	69.62	-	-	309	28.80	1,056	98.42	17	1.58	
	3	Painan Timur	1,162	938	80.72	-	-	190	16.35	1,128	97.07	34	2.93	
	4	Salido	1,765	1,164	65.95	-	-	539	30.54	1,703	96.49	62	3.51	
	5	Bungo Pasang Salido	912	467	51.21	240	26.32	158	17.32	865	94.85	47	5.15	
	6	Sago Salido	1,099	964	87.72	-	-	106	9.65	1,070	97.36	29	2.64	
	7	Tambang	420	35	8.33	279	66.43	92	21.90	406	96.67	14	3.33	
	8	Salido Sari Bulan	332	10	3.01	234	70.48	50	15.06	294	88.55	38	11.4 5	
	9	Koto Rawang	338	-	-	144	42.60	138	40.83	282	83.43	56	16.5 7	
	10	Bukit Kaciak Lumpo	243	171	70.37	-	-	41	16.87	212	87.24	31	12.7 6	
	11	Sungai Sariak Lumpo	181	-	-	130	71.82	21	11.60	151	83.43	30	16.5 7	
	12	Gunuang Bungkuak Lumpo	149	-	-	119	79.87	17	11.41	136	91.28	13	8.72	
	13	Ampang Tareh Lumpo	261	-	-	194	74.33	32	12.26	226	86.59	35	13.4 1	
	14	Ampuan Lumpo	235	30	12.77	139	59.15	48	20.43	217	92.34	18	7.66	
	15	Balai Sinayan Lumpo	145	14	9.66	103	71.03	15	10.34	132	91.03	13	8.97	
	16	Lumpo	237	166	70.04	-	-	45	18.99	211	89.03	26	10.9 7	

	17	Taratak Tengah Lumpo	252	37	14.68	35	13.89	148	58.73	220	87.30	32	12.70	
	18	Batu Kunik Lumpo	175	-	-	172	98.29	3	1.71	175	100.00	-	-	
	19	Limau Gadang Lumpo	236	-	-	163	69.07	32	13.56	195	82.63	41	17.37	
	20	Sungai Gayo Lumpo	220	-	-	157	71.36	53	24.09	210	95.45	10	4.55	
XIII	BAYANG		8,541	2,365	27.69	1,045	12.24	4,408	51.61	7,818	91.53	723	8.47	
	1	Pasar Baru	911	209	22.94	-	-	667	73.22	876	96.16	35	3.84	
	2	Talaok	495	162	32.73	-	-	324	65.45	486	98.18	9	1.82	
	3	Koto Barapak	554	105	18.95	-	-	381	68.77	486	87.73	68	12.27	
	4	Gurun Panjang	445	227	51.01	112	25.17	95	21.35	434	97.53	11	2.47	
	5	Api Api Pasar Baru	503	54	10.74	-	-	382	75.94	436	86.68	67	13.32	
	6	Tanjung Durian Pasar Baru	474	138	29.11	-	-	307	64.77	445	93.88	29	6.12	
	7	Asam Kamba Pasar Baru	466	49	10.52	-	-	357	76.61	406	87.12	60	12.88	
	8	Sawah Laweh Pasar Baru	700	-	-	92	13.14	605	86.43	697	99.57	3	0.43	
	9	Kapeh Panji Jaya Talaok	585	278	47.52	-	-	275	47.01	553	94.53	32	5.47	
	10	Aur Bagalung Talaok	479	28	5.85	-	-	393	82.05	421	87.89	58	12.11	
	11	Kapelgam Koto Berapak	503	361	71.77	-	-	62	12.33	423	84.10	80	15.90	
	12	Koto Baru Koto Berapak	371	-	-	303	81.67	19	5.12	322	86.79	49	13.21	

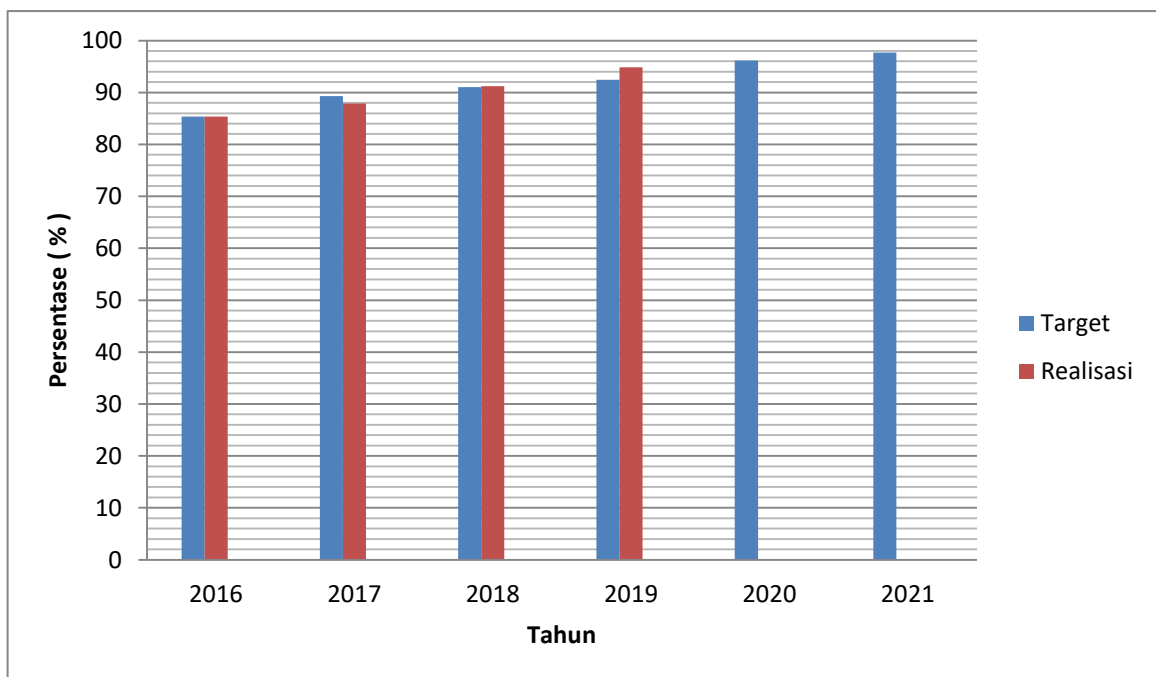
	13	Kubang Koto Berapak	349	-	-	223	63.90	37	10.60	260	74.50	89	25.50	
	14	Kapujan Koto Berapak	399	-	-	240	60.15	83	20.80	323	80.95	76	19.05	
	15	Gurun Panjang Utara	469	420	89.55	-	-	32	6.82	452	96.38	17	3.62	
	16	Gurun Panjang Barat	302	281	93.05	-	-	10	3.31	291	96.36	11	3.64	
	17	Gurun Panjang Selatan	536	53	9.89	75	13.99	379	70.71	507	94.59	29	5.41	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA		1,690	183	10.83	803	47.51	544	32.19	1,530	90.53	160	9.47	
	1	Puluik Puluik	405	-	-	354	87.41	49	12.10	403	99.51	2	0.49	
	2	Puluik Puluik Selatan	451	183	40.58	80	17.74	155	34.37	418	92.68	33	7.32	
	3	Koto Ranah	215	-	-	110	51.16	73	33.95	183	85.12	32	14.88	
	4	Muaro Aie	91	-	-	25	27.47	37	40.66	62	68.13	29	31.87	
	5	Pancung Taba	265	-	-	197	74.34	46	17.36	243	91.70	22	8.30	
	6	Limau Gadang	263	-	-	37	14.07	184	69.96	221	84.03	42	15.97	
XV	KOTO XI TARUSAN		11,275	428	3.80	4,123	36.57	6,048	53.64	10,599	94.00	676	6.00	
	1	Kapuh	1,065	-	-	-	-	1,024	96.15	1,024	96.15	41	3.85	
	2	Kapuh Utara	443	-	-	179	40.41	227	51.24	406	91.65	37	8.35	
	3	Jinang Kp. Pansur Ampang Pulai	561	25	4.46	-	-	463	82.53	488	86.99	73	13.01	
	4	Pulau Karam Ampang Pulai	492	25	5.08	-	-	430	87.40	455	92.48	37	7.52	
	5	Ampang Pulai	853	60	7.03	217	25.44	572	67.06	849	99.53	4	0.47	

6	Carocok Anau Ampang Pulai	256	21	8.20	116	45.31	100	39.06	237	92.58	19	7.42	
7	Nanggalo	743	-	-	-	-	685	92.19	685	92.19	58	7.81	
8	Setara Nanggalo	535	-	-	352	65.79	180	33.64	532	99.44	3	0.56	
9	Batu Hampar Selatan	431	-	-	48	11.14	347	80.51	395	91.65	36	8.35	
10	Batu Hampar	279	-	-	202	72.40	73	26.16	275	98.57	4	1.43	
11	Mandeh	304	180.00	59.21	30	9.87	92	30.26	302	99.34	2	0.66	
12	Sungai Nyalo Mudiak Aia	180	-	-	66	36.67	103	57.22	169	93.89	11	6.11	
13	Sungai Pinang	313	-	-	-	-	284	90.73	284	90.73	29	9.27	
14	Duku	936	-	-	659	70.41	241	25.75	900	96.15	36	3.85	
15	Duku Utara	575	-	-	564	98.09	10	1.74	574	99.83	1	0.17	
16	Barung Barung Balantai Selatan	389	-	-	88	22.62	273	70.18	361	92.80	28	7.20	
17	Barung Barung Balantai Tengah	390	-	-	227	58.21	127	32.56	354	90.77	36	9.23	
18	Barung Barung Balantai	568	117	20.60	210	36.97	203	35.74	530	93.31	38	6.69	
19	Barung Barung Balantai Timur	312	-	-	215	68.91	68	21.79	283	90.71	29	9.29	
20	Kampung Baru Korong Nan Ampek	192	-	-	145	75.52	45	23.44	190	98.96	2	1.04	
21	Taratak Sungai Lundang	563	-	-	205	36.41	251	44.58	456	80.99	107	19.01	
22	Siguntur Tua	197	-	-	151	76.65	26	13.20	177	89.85	20	10.15	
23	Siguntur	698	-	-	449	64.33	224	32.09	673	96.42	25	3.58	

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Cakupan air minum / bersih.

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Penduduk Berakses Air Miumm / Bersih

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian (%)	85,37	89,29	91,02	92,47	96,16	97,71
2	Realisasi (%)	85,37	87,86	91,22	94,88	-	-



Gambar 3.5

Target dan realisasi per tahun Cakupan Air Minum / Bersih menurut Renstra Revisi Tahun 2016 - 2021

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Air Minum pada tahun 2019 seperti terlihat pada gambar berikut :



Pembangunan Prasarana Air Minum Pasir Ganting Pulau Rajo Kec. Air Pura Tahun 2019

Capaian indikator persentase penduduk berakses air minum /bersih di hitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$\frac{100.748}{106.185} \times 100\% = 94.88\%$$

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih Tahun 2016 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase penduduk berakses air minum /bersih	%	85.37	87.86	91.22	94.88	100	98.40	100.22	102.61

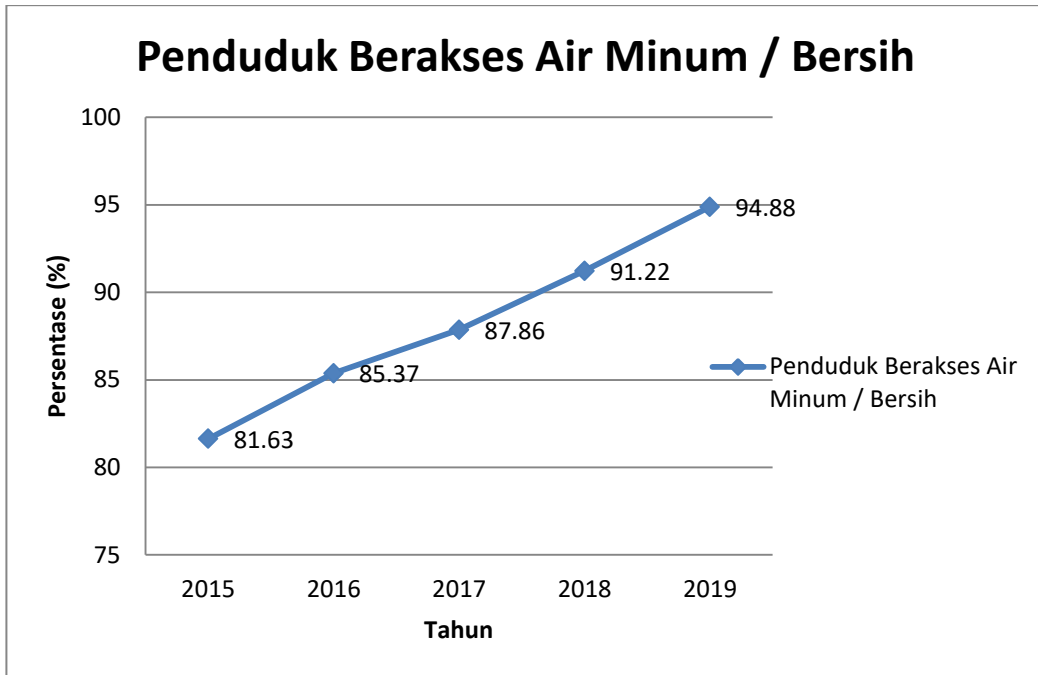
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Penduduk berakses air minum /bersih dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.25

Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015s/d2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk Berakses Air Minum / Bersih (%)	81.63%	85.37	87.86	91.22	94.88

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa penduduk berakses air minum / bersih mengalami peningkatan 3.66 % pada tahun 2019.



Gambar 3.6 Kenaikan cakupan air minum/ bersih tahun 2015 s/d 2019

2. Persentase Akses Sanitasi Layak

Capaian indikator Persentase Akses Sanitasi Layak di hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

Capaian indikator Persentase Akses Sanitasi Layak tahun 2019 di peroleh dari data jumlah tambahan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019 , sambungan Rumah IPAL Komunal tahun 2019 dan Jumlah sambungan rumah Hibah Australia tahun 2019 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Pada Tahun 2019 Sebagai berikut :

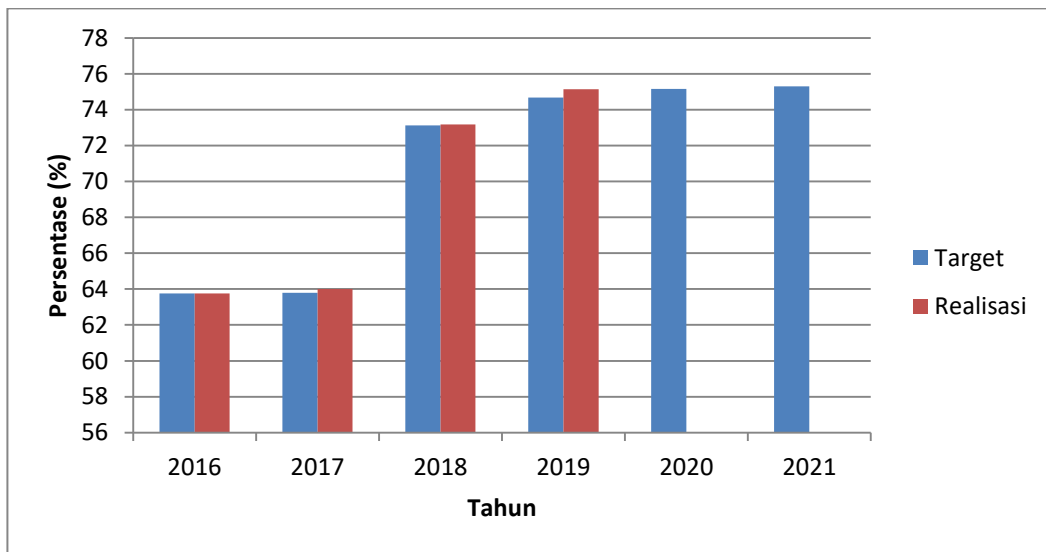
Tabel 3.26
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2019	Tambahan Jamban Pribadi Tahun 2019	Tambahan Sambungan Rumah (SR) Kegiatan Dinas PUTR Tahun 2019	Tambahan Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2019	Jumlah Rumah Tangga yg Memiliki Jamban Sehat Tahun 2019	Ket
		(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	(RT)	
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9
	JUMLAH	106.185	77,121	600	2.061	2.661	79.782	
I	SILAUT	3.505	2,248	30	364	394	2.642	
II	LUNANG	4.999	2.705	30	312	342	3.047	
III	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3.203	2.194	33	-	33	2.227	
IV	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3.520	2.227	27	-	27	2.254	
V	PANCUNG SOAL	6.153	4.003	30	-	30	4.033	
VI	AIR PURA	3.720	3.189	30	-	30	3.219	
VII	LINGGO SARI BAGANTI	10.491	8.304	53	204	257	8.561	
VIII	RANAH PESISIR	7.038	6.106	30	93	123	6.229	
IX	LENGAYANG	12.212	7.676	52	100	152	7.828	
X	SUTERA	11.731	10.064	47	199	101	10.165	
XI	BATANG KAPAS	7.309	4.423	27	685	226	4.649	
XII	IV JURAI	10.798	8.734	66	-	751	9.485	
XIII	BAYANG	8.541	6.191	55	-	55	6.246	
XIV	IV NAGARI BAYANG UTARA	1,690	1.159	21	-	21	1.180	
XV	KOTO XI TARUSAN	11.275	7.898	69	50	119	8.017	

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Cakupan Sanitasi.

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Akses Sanitasi Layak

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	63.76	63.80	73.13	74.68	75.16	75.29
2	Realisasi (%)	63.76	64.01	73.17	75.13		



Gambar 3.7
Target dan realisasi per tahun akse Sanitasi layak menurut Renstra Revisi Tahun 2016 – 2021

Hasil Pelaksanaan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2019 seperti terlihat pada gambar berikut :



Bangunan IPAL Komunal Nagari Kambang Timur Kec. Lengayang Tahun 2019

Persentase Cakupan Sanitasi tahun 2019 adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{79.782}{106.185} \times 100\% = 75,13\%$$

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Sanitasi Tahun 2016 s/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.	Akses Sanitasi Layak	%	63.76	64.01	73.17	75.13	100	100.33	100.05	100.60

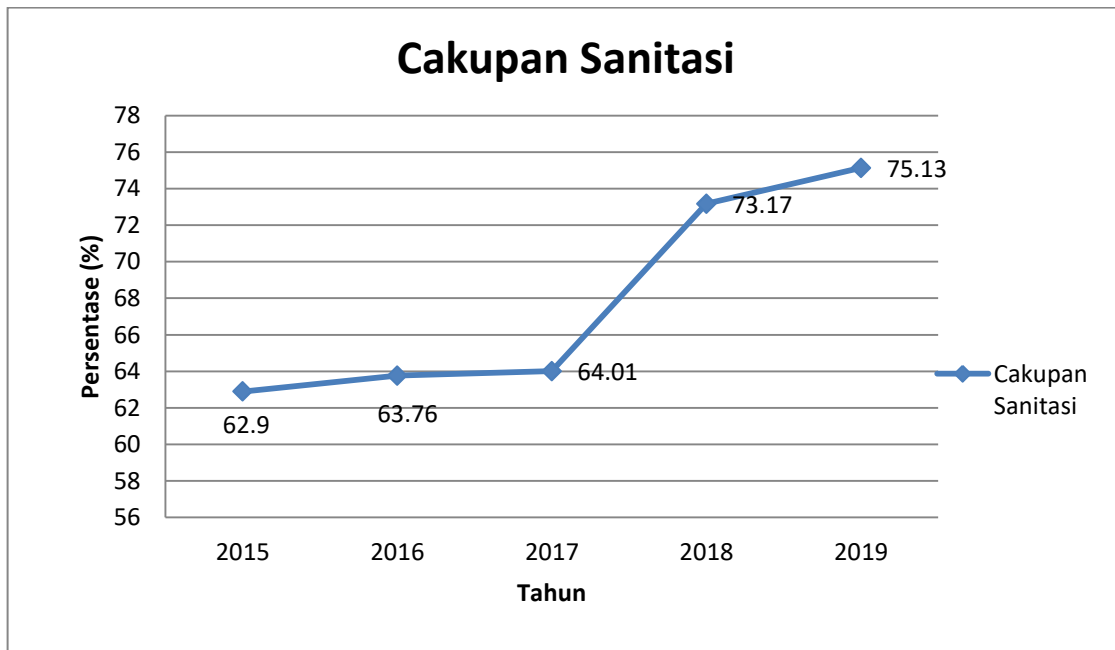
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Akse Sanitasi Layakdalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.29

Kenaikan akse sanitasi layak tahun 2015s/d2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Akses Sanitasi Layak (%)	62.90	63.76	64.01	73.17	75.13

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa akses sanitasi layak mengalami peningkatan 1.96 % pada tahun 2019.



Gambar 3.8 Kenaikan cakupan sanitasi tahun 2015 s/d 2019

Faktor – factor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prsarana pelayanan dasar masyarakat adalah :

1. Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari solusinya
2. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
3. Koordinasi dengan stakeholder intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan perencanaan SPAM sehingga permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari
4. Melalui pembentukan Pokja Sanitasi Kabupaten, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan kePokjaan sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.
5. Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian(%)
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	16.411.105.204,75	14.743.983.784	89,84
2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.568.952.062,25	3.523.134.182	98,72
	Total	19.980.057.267	18.267.117.966	91,43

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 19.980.057.267 terealisasi sebesar Rp. 18.267.117.966 atau 91,43%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,57% atau Rp. 1.712.939.301

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yakni :

1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan
2. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2019 telah menetapkan 4 (empat) Peraturan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

- a. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Carocok Painan , Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016
- b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Rumah Sakit Baru , Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016
- c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Carocok Tarusan , Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016

Berikut ini gambaran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang tahun 2019 untuk dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dengan target 12.5% dengan realisasi 12.5%, sedangkan untuk kawasan penyediaan ruang terbuka hijau dengan target 66.14% dengan realisasi kegiatan 66.14%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.31.

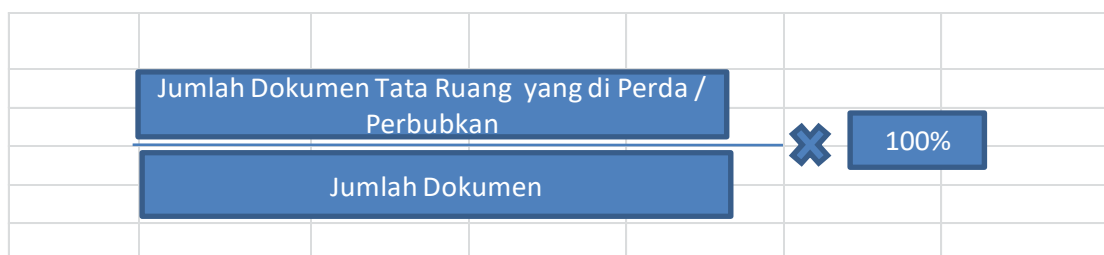
Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Tata Ruang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	%	12.5	12.5	100
2	Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	%	66.14	66.14	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan

Capaian Indikator persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dengan rumus:



Rencana penetapan rencana tata ruang sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang
 - a. Rencana Tata ruang wilayah (RTRW)
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - RDTR Perkotaan Tapan

- RDTR Perkotaan Painan
- RDTR Perkotaan Tarusan
- RDTR Perkotaan Pasar Baru
- RDTR Perkotaan Kambang
- RDTR Perkotaan Inderapura
- RDTR Perkotaan Lunang
- RDTR Perkotaan Barung - Belantai
- RDTR Perkotaan Asam Kumbang
- RDTR Perkotaan Lumpo
- RDTR Perkotaan Pasar Kuok
- RDTR Perkotaan Surantih
- RDTR Perkotaan Amping Parak
- RDTR Perkotaan Koto Baru Lengayang
- RDTR Perkotaan Lubuk Sarik
- RDTR Perkotaan Lakitan
- RDTR Perkotaan Balai Selasa
- RDTR Perkotaan Air Haji
- RDTR Perkotaan Muaro Sakai
- RDTR Perkotaan Sindang
- RDTR Perkotaan Silaut
- RDTR Perkotaan Kumbang

b. Kawasan Strategis

Rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

- Kawasan Mandeh
- Kawasan Panca Bulan
- Kawasan Mandeh Rubiah
- Kawasan Istana Indrapura

2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

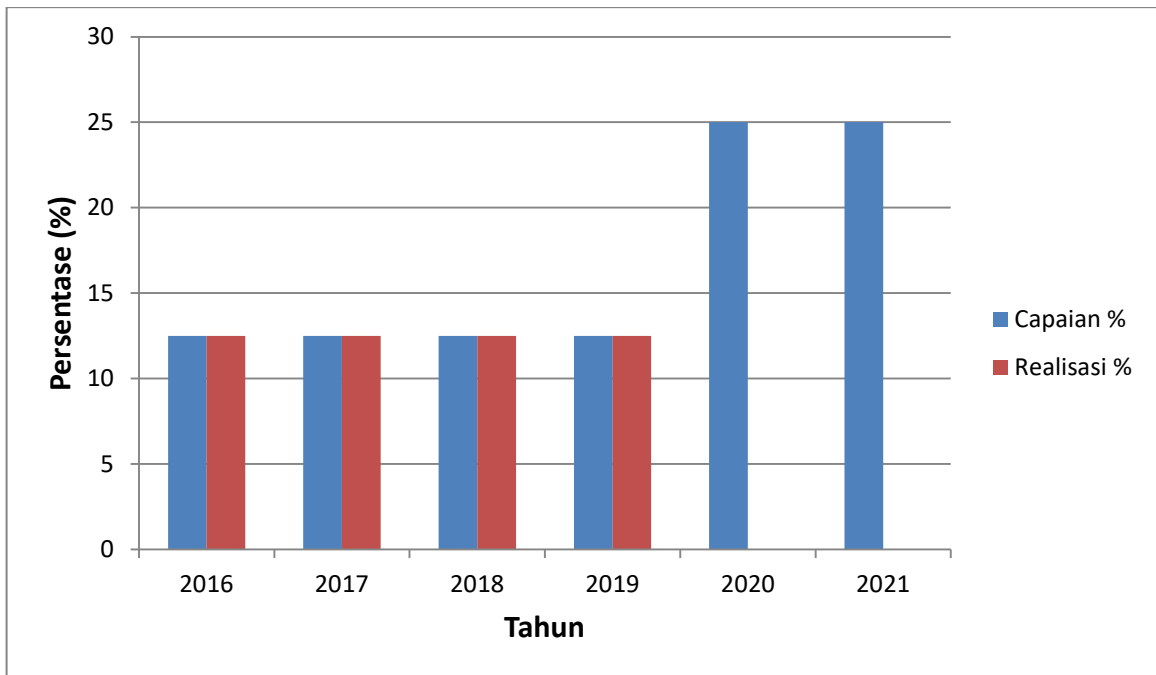
Dengan rincian sebagai berikut :

- RTBL Kawasan Carocok Tarusan
- RTBL Kawasan Rumah Sakit Baru
- RTBL Kawasan Carocok Painan
- RTBL Kawasan Mandeh
- RTBL Kawasan Sungai Nyalo

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan

Tabel 3.32
Target dan realisasi Persentase dokumen dan regulasi tata ruang
yang telah ditetapkan

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	12.5	12.5	12.5	12.5	25	25
2	Realisasi (%)	12.5	12.5	12.5	12.5		



Tabel 3.9Target dan Realisasi Per tahun dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan sebagai berikut :

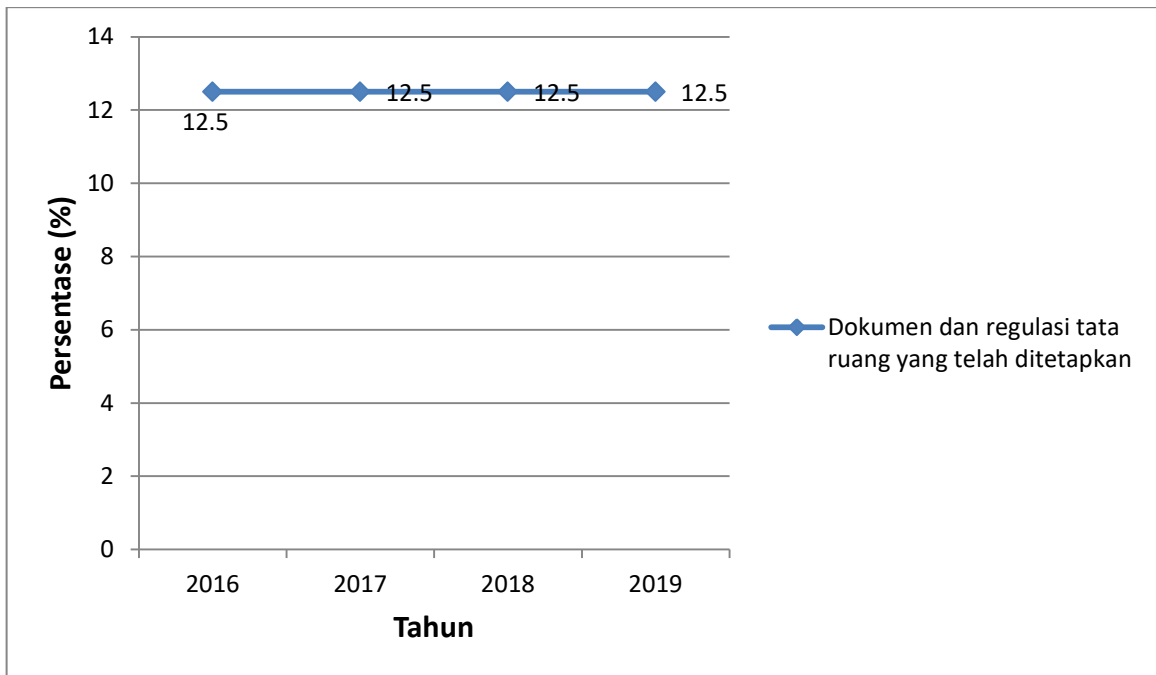
Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan Tahun 2016 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.	Dokumen dan Regulasi Tata Ruang Yang Telah Di Tetapkan	%	12.5	12.5	12.5	12.5	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik .

Tabel 3.34
Kenaikan Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan	12.5	12.5	12.5	12.5



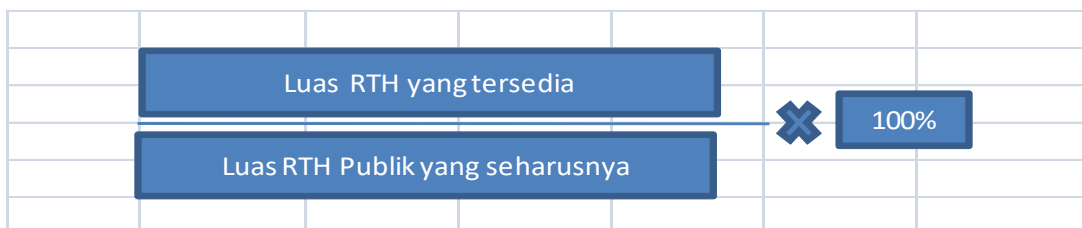
Gambar 3.10 Kenaikan Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan tahun 2016 s/d 2019

2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penyusunan Rencana Detail Tata ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terdiri dari:

1. Sepadan Sungai dan Pantai
2. Pemakaman
3. Lapangan olahraga
4. Taman skala Nagari, Kecamatan dan Kota
5. Hutan Kota
6. Taman Atap Bangunan

Capaian Indikator persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau dengan rumus



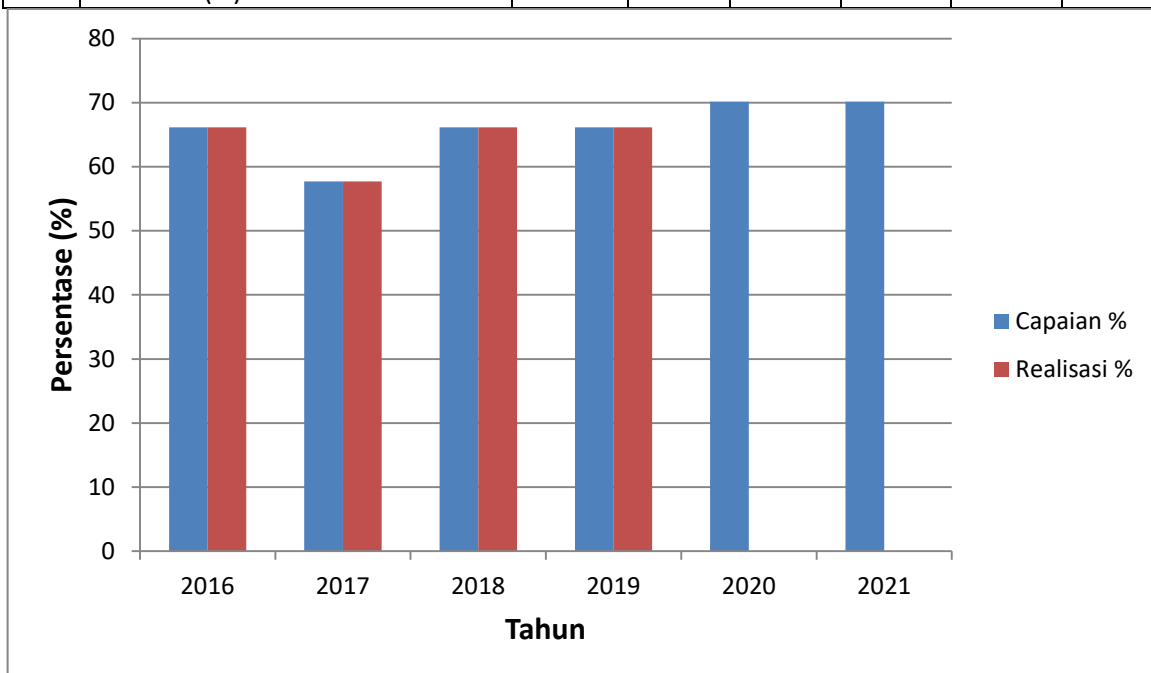
Rencana Detail Tata Ruang sampai dengan tahun 2019 ruang Terbuka Hijau telah di indentifikasi seluas 1.172,71 Ha (57,69%) sedangkan luas RTH seharusnya sebesar 2.023,27 Ha berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang penyediaan RTH 20% dari luas Perkotaan, berdasarkan peraturan masih ada kekurangan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 850,56 Ha (42,31%)

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator PersentaseKawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .

Tabel 3.35

Target dan realisasi Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (%)	66.14	57.69	66.14	66.14	70.14	70.14
2	Realisasi (%)	66.14	57.69	66.14	66.14		



Tabel 3.11 Target dan Realisasi Per tahun Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 s/d 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	%	66.14	57.69	66.14	66.14	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	415.678.201,00	395.590.000,00	95,17
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.393.826.619,00	1.390.817.765,00	99,78
3	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan	4.924.223.365,00	4.878.983.365,00	99,08
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	236.358.715,00	220.062.965,00	93,11
	Total	6.970.086.900,00	6.885.454.095,00	98,79

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 6.970.086.900 terealisasi sebesar Rp. 6.885.454.095 atau 98.79%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.21 % atau Rp. 84.632.805

Sasaran 4 : Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 Yakni : Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Indikator dari sasaran ini adalah Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik.

Jumlah Bangunan Pelayanan public yang berfungsi dengan baik yang di maksud terbagi atas Bangunan Strategis , Gedung Negara dan Gedung Pelayanan Publik yang selesai dibangun dan siap di tempati pada tahun 2019.

Formulasi jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik adalah :Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / Jumlah bangunan pelayanan publik yang dipelihara pertahun selama 5 tahun.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indicator kinerja sasaran strategis meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik antara lain :

Tabel 3.38

Program yang mendukung pencapaian target indicator kinerja yang ditetapkan

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	15.578.881.597,00	15.185.404.000,00	97,47
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	3.091.664.480,00	3.008.003.300,00	97,29
3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.620.667.489,00	8.610.836.952,00	99,89
	Total	27.291.213.566,00	26.804.244.252,00	98,22

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 27.291.213.566,00 terealisasi sebesar Rp. 26.804.244.252,00 atau 98,22 %. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,78 % atau Rp. 486.969.314,00

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelayanan Publik seperti terlihat pada gambar berikut:



Pembangunan Kantor Camat Pancung Soal Kec. Pancung Soal Tahun 2019

Tabel 3.39Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2019

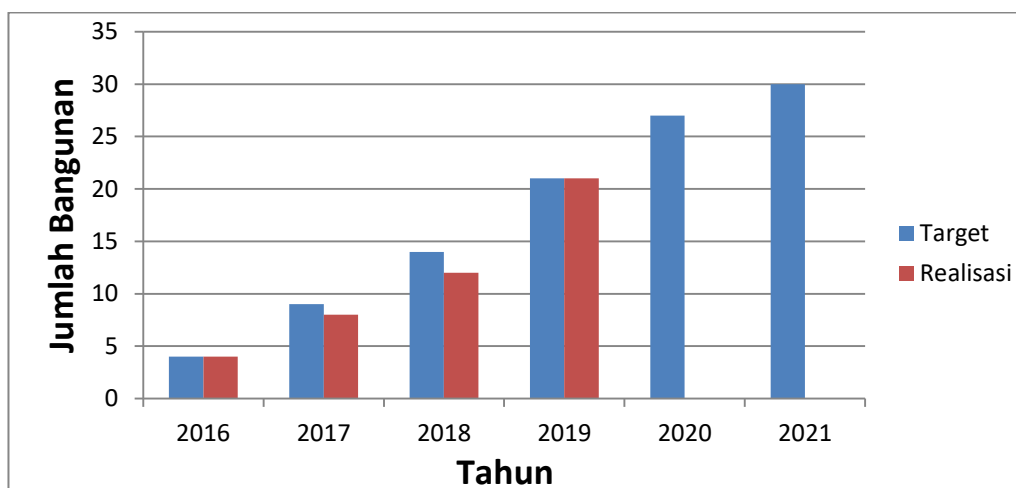
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik.	Unit	21	21	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Mengacu pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indicator Jumlah Pelayanan Publik berfungsi dengan baik sebagai berikut :

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target Capaian Setiap Tahun (Unit)	4	9	14	21	27	30
2	Realisasi (Unit)	4	8	12	21		



Gambar 3.12

Target dan Realisasi Per tahun Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Dengan Baik menurut Renstra Tahun 2016 -2021

Adapun Capaian Indikator Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Dengan Baik sebagai berikut :

Tabel 3.40

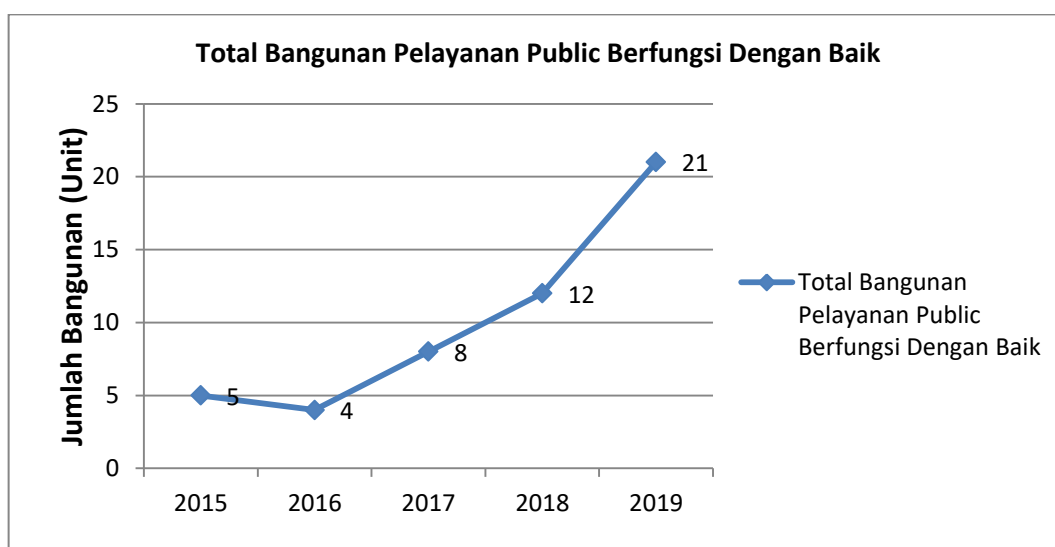
Capaian Kinerja Indikator Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik Tahun 2016 s/d 2019

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (unit)				Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik	4	8	12	21	100	94.52	93.03	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indicator *Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik* dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD dalam kategori sangat baik dan dapat di lihat bahwa jumlah bangunan pelayanan publik dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebanyak 9 Unit pada tahun 2019.

Tabel 3.41
Kenaikan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik tahun 2015s/d 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik berfungsi dengan baik (unit)	5	4	8	12	21



Gambar 3.13 Kenaikan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik tahun 2015 s/d 2019

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Public adalah :

1. Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti Pembangunan Gedung Kantor Camat Pancung Soal dan Kebudayaan dan Pembangunan UDKP Kecamatan Silaut yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2019.
2. Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 yakni : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yakni :Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat.

Tabel 3.42

Capaian Kinerja Indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat Tahun 2016 s/d 2018

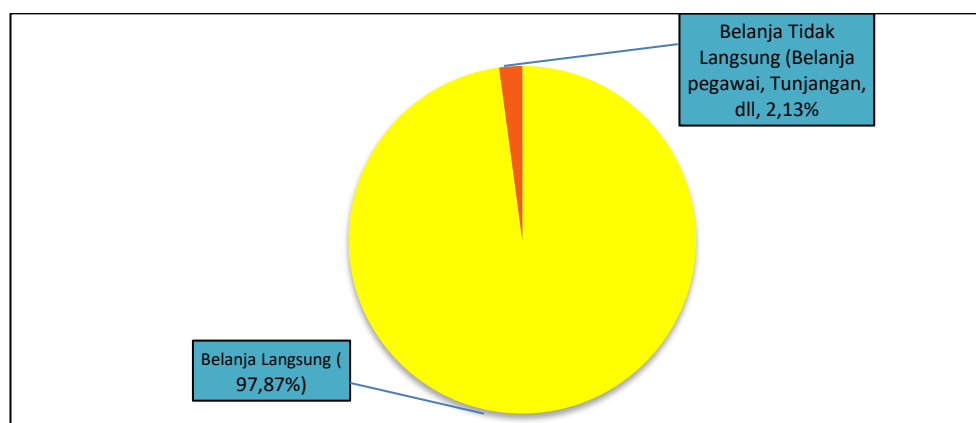
No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2017	2018	2019
1.	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat	A	A	*

**Hasil penilaian AKIP tahun 2019 belum ada dari Inspektorat*

Hasil penilaian AKIP Dinas PUTR Tahun 2019 belum ada karna masih dalam tahap proses evaluasi Laporan Kinerja (Lkj) oleh Inspektorat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 adalah sebesar Rp.233.228.529.711,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.228.250.480.922 atau 97,87% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.978.048.789,00 atau 2,13 % yang di gunakan untuk belanjapekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.



Gambar 3.13 Persentase Belanja Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun Anggaran 2019

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun 2019 atas instruksi Dinas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan anggaran
2. Adanya pengawasan dan control dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.
3. Telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, tercantum pada table berikut :

Tabel 3.43

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	94.279.575.565,00	91.133.102.573,00	96,66
2	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	19.980.057.267,00	18.267.117.966,00	91,43
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	6.970.086.900,00	6.885.454.095,00	98,79
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	27.291.213.566,00	26.804.244.252,00	98,22
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.361.013.854,00	2.225.945.131,00	94,28
TOTAL		150.881.947.152,00	145.315.864.017,00	96,31

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Dari tabel 3.43 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar Rp 150.881.947.152,00 terealisasi sebesar Rp 145.315.864.017,00 atau 96,31 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,69 % atau secara absolut sebesar Rp5.566.083.135,00
- b. Sisa anggaran sebesar Rp 5.566.083.135,00 mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 5(lima) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 100%, dengan nilai tertinggi adalah 102,61% yaitu sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar. Sedangkan nilai terendah 91,40% yaitu sasaran “meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan”.

2. Capaian Indikator Kinerja

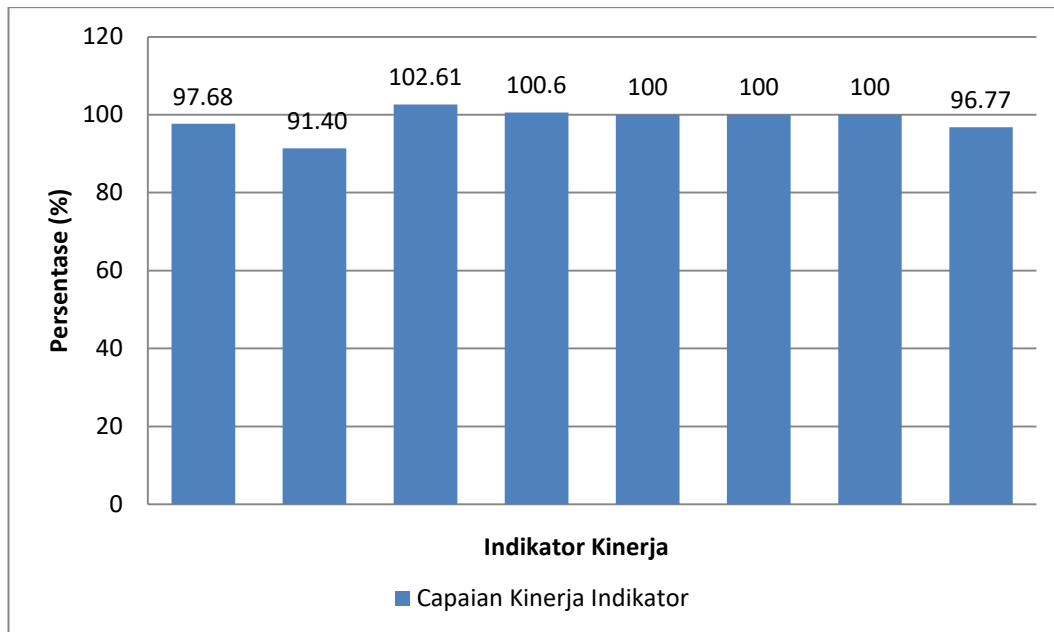
Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berhasil mencapai target dan melampaui target 2(dua) indikator. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%, dengan nilai tertinggi adalah 102,61 % yaitu indikator kinerja utama “Persentase penduduk berakses air minum / bersih”, sedangkan nilai terendah 91,40 % yaitu indikator kinerja utama “Persentase Jembatan Kabupaten kondisi baik”.

Tabel 3.44

Pencapaian Kinerja Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik. 2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.	97.68 91.40
2	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Persentase penduduk berakses air minum / bersih. 2. Persentase akses sanitasi layak	102.61 100.60
3	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	1. Persentase dokumen dan regulasi tata ruang yang telah ditetapkan 2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	100 100
4	Meningkatnya penataan bangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah bangunan pelayanan public berfungsi dengan baik	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR Oleh Inspektorat	*

* Hasil penilaian AKIP tahun 2019 belum ada dari Inspektorat



Gambar 3.14
Capaian Kinerja Indikator

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp145.315.864.017,00 atau 96,31 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp150.881.947.152,00. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang” yaitu 98,79 % dan terendah adalah “Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar” yaitu 91.43 %.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Adanya Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tetapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan
2. Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan perlu penambahan dan peningkatan SDM.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasisir Selatan lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparturnya.

4. Kendala – kendala yang di hadapi pada tahun 2019 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Demikianlah laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ini kami buat dan sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Painan, Februari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003